

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Tangerang Selatan**

sebelum revisi

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Kebijakan	PROGRAM
Terwujudnya Pelayanan Prima 2016	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan	1.1.1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	1. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	Laporan	4	4	4	4	4	4	1. Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	Program Non Urusan Setiap SKPD, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
				2. Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase	60	70	75	80	85	90		
			1.1.2. Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah	1. Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan & Pelatihan Kedinasan	Orang	7	8	12	15	20	25	Sosialisasi Perda HO dan IMB (7 Kec & 1 Pemkot)	
				2. Sosialisasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan	Kali	4	8	10	12	14	16		
	2. Mengembangkan Sistem dan Mekanisme Pelayanan Yang Partisipatif dan Terintegrasi	2.1. Meningkatkan Sistem dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi	2.1.1. Meningkatnya Sistem dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi	1. Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perijinan	Prosentase	75	80	85	88	90	92	2. SOP Pelayanan BP2T	
				2. Prosentase Surat Keputusan Ijin Pajak dan Retribusi Yang Dikeluarkan	Prosentase	75	80	85	88	90	92		
			2.1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Prosentase	0	65	70	75	80	85		
				2. Penyelesaian Ijin Sesuai Target Waktu	Prosentase	0	80	85	88	90	92		
				3. Jumlah Sistem Pelayanan Terpadu	Unit	1	0	0	0	0	0		
			3. Ketersediaan Data/ Informasi dan Dokumen Pelayanan Yang Komprehensif Serta Akurat	3.1. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Perijinan Terpadu	3.1.1. Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan	1. Jumlah Pajak/Retribusi Daerah yang dikelola.	Jenis	2	2	2	2		
	2. Laporan Jumlah Pendaftar Perijinan	Prosentase				75	80	85	88	90	92		
	3. Pendapatan Asli Daerah	Rp				15M	21,7M	23M	25M	27M	28M		

MATRIKS RENSTRA 2011-2016

PROGRAM	KEGIATAN	2011	2012	PAGU INDIKATIF			
				2013	2014	2015	2016
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PROGRAM NON URUSAN SETIAP SKPD	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.008.702.000	1.209.178.914	1.350.000.000	1.485.000.000	1.630.000.000	1.795.000.000
	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.121.562.500	703.617.586	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000
	3 Peningkatan Disiplin Aparatur	-	188.046.885	250.000.000	275.000.000	305.000.000	350.000.000
	4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	46.075.000	71.543.000	150.000.000	165.000.000	182.000.000	200.000.000
	5 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.	237.517.000	326.065.000	250.000.000	275.000.000	305.000.000	350.000.000
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	6 Optimalisasi Pelayanan Perijinan Keliling Bidang Ekonomi dan Kesra melalui Website.	-	-	250.000.000	275.000.000	305.000.000	350.000.000
	7 Fasilitasi Pemanfaatan Sistem Verifikasi dan Penetapan Perijinan.	279.805.000	241.835.000	250.000.000	275.000.000	305.000.000	350.000.000
	8 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan.	-	60.035.000	200.000.000	220.000.000	245.000.000	270.000.000
	9 Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat Secara Berkala.	279.811.700	249.925.000	300.000.000	330.000.000	365.000.000	402.000.000
	10 Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan.	253.200.000	249.989.000	300.000.000	330.000.000	365.000.000	402.000.000
	11 Penyusunan Informasi terhadap Layanan Publik	929.075.000	500.000.000	2.800.000.000	3.080.000.000	3.388.000.000	3.726.000.000
	12 Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis Teknologi Informasi.	320.275.000	127.315.750	150.000.000	165.000.000	182.000.000	200.500.000
	13 Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis Teknologi Informasi.	-	222.684.250	250.000.000	275.000.000	305.000.000	350.000.000
	14 Evaluasi Sistem Pelayanan Perijinan.	-	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000	67.000.000
	15 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Bidang Kesra	149.475.000	150.000.000	150.000.000	165.000.000	182.000.000	200.500.000

PROGRAM	KEGIATAN	2011	2012	PAGU INDIKATIF			
				2013	2014	2015	2016
				Rp	Rp	Rp	Rp
	16 Optimalisasi Tindak lanjut Potensi Pelanggaran Bidang Kesra	-	-	150.000.000	165.000.000	182.000.000	200.500.000
	17 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan.	164.900.000	150.000.000	150.000.000	165.000.000	182.000.000	200.500.000
	18 Optimalisasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat.	39.197.000	49.992.000	50.000.000	55.000.000	60.500.000	67.000.000
	19 Penyusunan Media Informasi	169.839.000	550.000.000	1.300.000.000	1.430.000.000	1.573.000.000	1.731.000.000
	20 Penyusunan Kebijakan Tentang Retribusi Daerah	-	200.000.000	-	-	-	-
	21 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	229.386.000	200.000.000	-	-	-	-
	22 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	107.525.000	300.000.000	-	-	-	-
	23 Bimbingan Teknis Perijinan Bidang Pengawasan, Pengendalian & Pengaduan	-	249.357.464	-	-	-	-
	24 Penyelenggaraan Unit Pelayanan Perijinan Keliling	-	750.000.000	-	-	-	-
	JUMLAH	7.336.345.200	6.749.584.849	9.150.000.000	10.085.000.000	11.122.000.000	12.312.000.000

KEPALA,

Drs. H. DADANG SOFYAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610124 198603 1 006

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator kinerja
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Tangerang Selatan**

Revisi Matriks Renstra BP2T (2013)

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
Terwujudnya Pelayanan Prima di Tahun 2016	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	1.1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan	1.1.1. Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah	1. Jangka waktu / Lamanya Proses Perijinan Bidang Pembangunan	Hari
				2. Jangka waktu / Lamanya Proses Perijinan Bidang Kesra	Hari
	2. Mengembangkan Sistem dan Mekanisme Pelayanan Yang Partisipatif dan Terintegrasi	2.1. Meningkatkan Sistem, Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi	2.1.1. Meningkatnya Sistem, Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi	1. Penyelesaian Pelayanan Perijinan	Prosentase
				2. Penanganan Aduan Terkait Pelayanan Perijinan	Prosentase
				3. Kegiatan Sosialisasi Ke Masyarakat	Kali
				4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Prosentase
	3. Ketersediaan Data/ Informasi dan Dokumen Pelayanan Yang Komprehensif Serta Akurat	3.1. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Perijinan Terpadu	3.1.1. Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan	1. Laporan Jumlah Pendaftar Perijinan	Prosentase
				2. Jumlah SK Perijinan yang Terbit	Prosentase
				3. Laporan Hasil Pemeriksaan Objek-Objek Perijinan	Laporan

Perencanaan dan Kegiatan
 Berbasis Data

2011	2012	2013	2014	2015	2016	KEGIATAN	PROGRAM
45	40	35	30	30	25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan.	Program Non Urusan Setiap SKPD dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
14	14	14	14	14	14	Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis Teknologi	
95	95	95	95	95	95	Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis Teknologi Informasi	
85	90	90	95	95	95	Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	
4	8	10	12	14	16	Penyebarluasan Informasi Terhadap Layanan Publik	
0	65	70	75	80	85	Penyusunan Media Informasi	
75	80	85	88	90	92	Optimalisasi Pelayanan Perijinan Keliling Bidang Ekonomi dan Kesra melalui website	
80	85	90	95	95	95	Fasilitasi Pemanfaatan Sistem Verifikasi & Penetapan Perijinan	
12	12	12	12	12	12	Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesra Secara Berkala	